



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 7 November 2023
Waktu	: 13.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kemensos RI TA 2023; 2. Rencana Program dan Anggaran Kemensos RI TA 2024; 3. Isu-Isu Aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariuz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 29 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Sosial RI, Dr. (H.C) Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T.; 3. Jajaran Kementerian Sosial RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI TA 2024 sebagai berikut:

No	Usulan	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya salur		
	a. PKH/Sembako/BPNT	832.040.000.000	
	b. YAPI	35.224.215.000	378.755 Orang x 6 Bln x Rp15.500
	c. Lanjut usia	420.360.000	2.260 Pokmas x 12 Bln x Rp15.500
	d. Disabilitas	297.600.000	1.600 Pokmas x 12 Bln x Rp15.500
2.	Rumah Sejahtera Terpadu (RST)	182.000.000.000	9.100 rumah
3.	Tambahan honor pendamping PKH	350.000.000.000	3 bulan
4.	Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENANA)	120.000.000.000	20.000 KPM
5.	Asuransi Kesehatan Pendamping Sosial (PKH, TKSK, TAGANA, Pendamping Rehsos dan Pordam)	13.440.000.000	70.000 Pendamping sosial
6.	YAPI (Data Kemensos LKS non-PKH)	454.506.000.000	378.755 orang x 6 bulan
7.	Permakanan		
	a. Lansia	552.000.000.000	Rp 30.000 x 184 hari x 100.000 PM
	b. Disabilitas	186.432.480.000	Rp30.000 x 184 hari x 33.774 PM
	c. Biaya pengantaran permakanan	49.228.832.000	Rp2.000 x 184 hari x 133.774 PM
	d. Dukungan operasional permakanan dan YAPI	67.708.495.000	
	Total	Rp2.843.297.982.000	

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda “Evaluasi Program dan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2023, Rencana Program dan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial RI TA 2023 sebesar Rp62.739.331.469.297,- (*Enam Puluh Dua Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sampai tanggal 5 November 2023 atau sekitar 79,00 persen dari Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI TA 2023 sebesar Rp79.419.425.895.000,- (*Tujuh Puluh Sembilan Triliun Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA	PAGU	REALISASI	%
Pegawai	485.724.283.000	353.704.570.786	72,82
Barang	3.287.065.774.000	2.259.482.966.800	68,74
Modal	133.461.189.000	80.236.005.721	60,12
Bantuan Sosial	75.513.174.649.000	60.045.907.925.990	79,52
TOTAL	79.419.425.895.000	62.739.331.469.297	79,00

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI untuk meningkatkan serapan anggaran Kementerian Sosial RI TA 2023 agar lebih optimal.

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami alokasi anggaran belanja per Unit Eselon I Kementerian Sosial RI TA 2024 sebesar Rp79.214.083.464.000,- (*Tujuh Puluh Sembilan Triliun Dua Ratus Empat Belas Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

UKE I	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BANSOS	TOTAL
Setjen	173.356.958	420.865.158	85.528.960		679.751.076
Itjen	16.864.125	27.544.204			44.408.329
Dayasos	24.678.932	256.023.459		45.199.125.000	45.479.827.391
Rehsos	253.040.080	934.889.684		1.311.773.533	2.499.703.297
Linjamsos	25.032.445	1.383.823.402		29.101.537.524	30.510.393.371
TOTAL	492.972.540	3.023.145.907	85.528.960	75.612.436.057	79.214.083.464

*Dalam ribuan rupiah

4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mendorong bantuan langsung tunai (BLT) untuk korban El Nino disalurkan melalui PT. Pos Indonesia.
 - b. Mendorong penambahan alokasi jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Sosial RI.
 - c. Mendorong perbaikan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) untuk memverifikasi dan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - d. Mendorong penyaluran program-program sosial agar dapat dilakukan secara tepat sasaran.
 - e. Mendorong realokasi atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 agar dapat dimanfaatkan untuk program yang lain.
 - f. Mengkaji secara cermat atas rencana Pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2024, khususnya tenaga honorer di lingkungan Kemensos.
5. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Sosial RI sepakat untuk melakukan pendalaman terhadap Program dan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2023, Rencana Program dan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual dalam forum diskusi kelompok terarah yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.57 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag